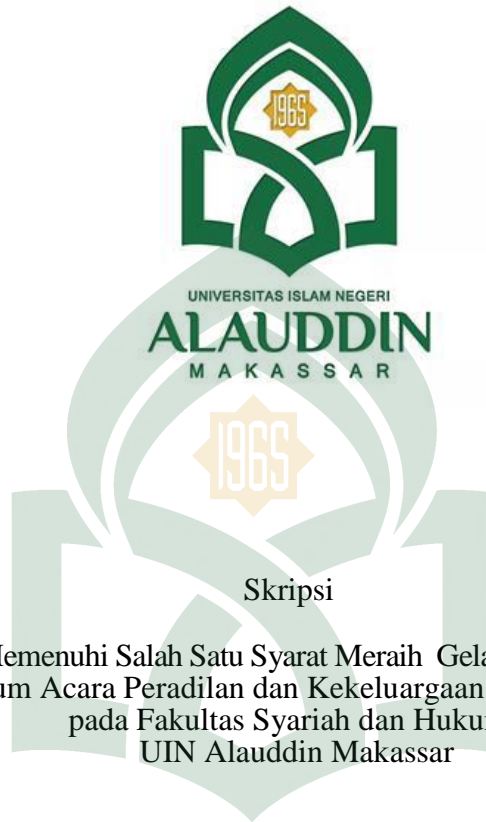


PENERAPAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENANGGULANGI
PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh:
NUR ALIMAHMUDRIKAH RUSYDI
NIM: 10100113107

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi

NIM : 10100113107

Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 08 Maret 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan /Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan/S1

Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/S1

Alamat : BTN Samata Indah

Judul : Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi
Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

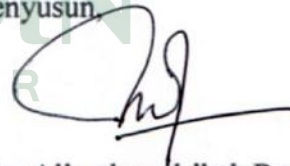
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 12 Mei 2017

Penyusun,



Nur Alimahmudrikah Rusydi

NIM: 10100113107

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PENERAPAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS", yang disusun oleh Nur Alimahmudrikah Rusydi, NIM: 10100113107, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 M, bertepatan dengan 12 Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 Juli 2017 M
09 Syawwal 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Fatmawati Hilal, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji hanya milik Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswah dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Muh Rusydi, M.M. (almarhum) dan Ibunda ST. Munirah D, S.HI. serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Selain itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.S.i, Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin. M.H.I dan Dr. Patimah, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. H. Supardin M.H.I dan Dr. Patimah, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam menyusun skripsi ini dan membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.

5. Para Dosen, dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung.
6. S. Abd Rahim Assaqqaf, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan para staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
7. Nur Alfadhilah Rusydi, S.Pd., M.Pd, kakakku tercinta dan adik-adiku tercinta Nur Inayatul Muhajirah Rusydi dan Nur Hasanah Mar'iyah Rusydi yang telah memberikan do'a, motivasi, dan bantuannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Peradilan angkatan 2013 terutama PA C atas keikhlasan dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah, semoga rasa solidaritas kita jangan sampai terlupakan.

Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah SWT penulis harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, tapi juga untuk masyarakat luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, Mei 2017
Penulis



Nur Alimahmudrikah Rusydi

Nim. 10100113107

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
TRANSLITERASI ARAB.....	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Focus Penelitian dan Deskripsi Focus	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9-36
A. Pencatatan Perkawinan	9
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	9
2. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Perkawinan.....	10
B. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)	11
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin	11
2. Pelaksana Kursus Calon Pengantin	11
3. Materi-Materi Kursus Calon Pengantin.....	12
4. Tujuan dan Manfaat Kursus Calon Pengantin	28
C. Perceraian	29

1. Pengertian Perceraian	29
2. Dasar Hukum Perceraian	30
3. Sebab-Sebab Perceraian.....	31
4. Dampak Perceraian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37-43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data	42
BAB IV KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENENGGULANGI PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS	44-78
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Bontoa	44
1. Sejarah Kecamatan Bontoa.....	44
2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Bontoa	45
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa.....	50
B. Metode Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros	55
C. Efektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Kasus Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten maros.....	67

D. Analisis terhadap penerapan Peraturan Direktur Jenderal Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros	75
BAB V PENUTUP.....	79-80
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA	81-83
LAMPIRAN	
RIWAT HIDUP	



Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Bc
ت	ta	t	Tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	y	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	<i>fathahrdanryā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَى...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ىِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

A. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjainah*

B. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

C. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

سَيِّءٌ : *syai'un*

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

E. Lafz al-Jalalah (ﷲ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billah Dinullah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fi rahmatillah*

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

ABSTRAK

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Judul : Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi
Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana metode kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa? dan bagaimana efektivitas kursus calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros?.

Penyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*liberary research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis syar'i, serta melalui informan (Peserta kursus calon pengantin dan pejabat KUA Kecamatan Bontoa), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan kursus calon pengantin dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kursus calon pengantin dalam menanggulangi perceraian mulai diterapkan pada tahun 2010, adapun penyelenggara kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa yaitu Kepala KUA, penyuluh, penghulu yang bekerjasama dengan BP4, metode yang digunakan oleh narasumber adalah model penasehatan/ceramah, penyampaian materi dengan cara berpasangan atau berkelompok sesuai dengan volume pendaftar yang telah ditentukan. Adapun waktu pelaksanaannya 2x (dua kali) dalam seminggu mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00, yaitu hanya 3 jam pelajaran dalam sehari dan setiap peserta kursus calon pengantin yang telah mengikuti 3 jam pelajaran diberikan sertifikat bukti kelulusan yang menjadi syarat pendaftaran/pencatatan perkawinan dan efektivitas kursus calon pengantin di Kecamatan Bontoa sudah tergambarkan dalam angka perceraian yang terjadi pada tahun 2010-2016 cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa kursus calon pengantin tidak efektif dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Bontoa. Perceraian dapat terjadi disebabkan karena faktor usia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan perkawinan, ada pun faktor-faktor lain diantaranya: ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip dan campur tangan orang tua.

Implikasi dalam penelitian ini adalah agar kiranya Kementerian Agama diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasan dalam proses tersebut sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan, untuk Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara lebih intensif dalam pemberian materi dan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin dan untuk masyarakat/calon pengantin diharapkan mendaftarkan diri mengikuti kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 10 hari jam kerja KUA dari waktu sebelum akad nikah dan lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber serta mengaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah” yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah swt.²

Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Firman Allah QS. Adh-Dharyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.³

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 15.

³Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011).

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan untuk memperoleh keluarga yang sakinah artinya tenang dalam hal, orang yang telah langsung melaksanakan pernikahan ingin memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Tujuan perkawinan mawadah yaitu membentuk keluarga yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan semua hal yg berkaitan dengan jasmaniah. Tujuan pernikahan rahmah yaitu memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Firman Allah QS. Ar-Ruum/30:21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut yakni keinginan untuk membentuk keluarga yang sakina, mawadah dan rahmah bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri.

⁴Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang mulia namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus dan jalan yang terakhir yang ditempuh dua belah pihak yang terikat dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah pemutusan ikatan perkawinan.

Di dalam undang-undang perkawinan mengatur tentang alasan-alasan yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain selama dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga.⁵

Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. Karena itu pulalah Pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dalam Peraturan Direktur jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, diinstruksikan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Penyelenggara kursus calon pengantin adalah badan penasehat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Departemen Agama.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th.), h. 216-217.

Adapun materi khusus kursus calon pengantin yaitu :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan kekeluargaan
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan (Reproduksi Sehat)
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga

Dengan demikian dapat di pahami bahwa sesungguhnya tujuan dari kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga. Karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat judul **Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas sekaligus memperjelas masalah yang akan diteliti, maka pokok masalahnya adalah: Bagaimana penerapan kursus calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros?

Ada pun sub masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros?

2. Bagaimana efektivitas kursus calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Agar menghindari kekeliruan dalam penafsian terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini: Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Kursus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat.⁶

Calon pengantin adalah orang yang akan menjadi pengantin atau orang yang akan melangsungkan pernikahan.

Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggualang, menanggulangi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti menghadapi atau mengatasi.⁷

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁸

⁶Ebta Setiawan, "Kamus Versi Online". Blog Ebta Setiawan. <http://kbbi.web.id/bina>, (20 April 2016).

⁷Ebta Setiawan, "Kamus Versi Online". Blog Ebta Setiawan. <http://kbbi.web.id/bina>, (16 Maret 2016).

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, ada pun judul dari skripsi ini adalah Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian di mana calon penulis harus mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dia teliti. Ini dimaksudkan agar calon peneliti benar-benar mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu. Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muh Tang dalam bukunya *Kursus Pranikah Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, 2013 membahas tentang materi-materi kursus calon pengantin/pranikah sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang metode yang digunakan dan efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa .
2. Hamzah Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah*, 2005 membahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun keluarga sakinah sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang metode yang digunakan dan efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa.

⁸Muchlisin, Riadi, <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, (12 Maret 2016).

3. Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, 2005 membahas tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang metode yang digunakan dan efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa
4. Khotimah dalam skripsinya *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta*, 2007 menerangkan tentang persepsi peserta kursus calon pengantin tentang metode dan materi yang digunakan oleh pembimbing selama bimbingan, dan dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa kursus calon pengantin diterima dengan baik oleh calon pengantin karena materi-materi yang disampaikan bagi mereka (calon pasangan suami isteri) sangat dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga sedangkan dalam skripsi ini mengkaji tentang metode yang digunakan dan efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa.⁹
5. Diah Maziatu Chalida dalam skripsinya *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*, 2010 menjelaskan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan untuk apa kursus calon pengantin diwajibkan bagi calon pasangan suami

⁹Khotimah, "Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pranikah BP4 Kec. Depok Kab. Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2007).

istri sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dan efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi kasus perceraian di kecamatan Bontoa.¹⁰

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan para calon pengantin mengenai materi kursus calon pengantin sebagai bekal awal untuk berumah tangga demi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tujuan perkawinan.
3. Penelitian skripsi ini di harapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

¹⁰ Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (studi kasus KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi (Banjarnegara: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) .

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum.¹ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Allah QS.Al-Baqarah/02:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.²

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya di jelaskan dalam ayat tersebut bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan lebih benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan.

¹Duray Achmad, "PencatatanrPerkawinanrdirKantorrUrusanrAgama", (Jakarta Skripsi: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2016).

²Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatatan niakh yang melangsungkan pencatatan. Ketika akan melangsungkan akad perkawinan. Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga Negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti aotentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

2. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Perkawinan

a. Tujuan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami dan isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti autentik atas pebuatan hukum yang telah mereka lakukan.

b. Fungsi pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri.³

³ Isti Astuti Savitri, *”Efektifitas pencatatan perkawinan padar KUA Kecamatan Bekasi Utara”*, (Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

B. Kursus Calon Pengantin (*Suscatin*)

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁴

2. Pelaksana Kursus Calon Pengantin

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga /organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus calon pengantin yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Sebagaiman dalam Pasal 3 ayat 1,2,3, dan 4 yang menyatakan :

- a. Materi kursus calon pengantin meliputi
 - 1) Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - 2) Pengetahuan agama (5 jam)
 - 3) Peraturan perundang di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - 4) Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - 5) Kesehatan (kesehatan reproduksi) (3 jam)
 - 6) Manajemen keluarga (3 jam)
 - 7) Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- b. Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- c. Narasumber terdiri dari konsultan\ perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- d. Materi kursus calon pengantin di berikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran

Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan

Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga yang mendapat Akreditasi dari Depertemen Agama;

⁴Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin, h. 2.

Pasal 5 ayat 1

Depertemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus; sebagaimana dalam Pasal 6 yang menyatakan:

- a. Catin yang telah mengikuti kursus catin di berikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- b. Sertifikat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- c. Sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh badan atau Lembaga Penyelenggaraan setelah diregister oleh Depertemen Agama
- d. Bentuk Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.⁵

3. Materi materi Kursus Calon Pengantin

a. Prosedur dan tata cara perkawinan (2 jam)

1) Prosedur perkawinan

a) Ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan:

- (1) Surat keterangan untuk menikah (model N1)
- (2) Surat keterangan asal-usul (model N2)
- (3) Surat keterangan orang tua (model N4)
- (4) Surat keterangan ke Puskesmas untuk imunisasi TT I

b) Ke Puskesmas untuk:

- (1) Imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita
- (2) Imunisasi TT II dapat diperoleh dimana saja dengan menunjukkan kartu/bukti imunisasi TT I

c) Ke Kekantor Urusan Agama (KUA) untuk memberitahukan kehendak nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, diantaranya;

⁵Depertemen Agama RI, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departeman Agama No. DJ.II/491.2009 Tentang Kursus Calon Pengantin*, h. 2-3.

- (1) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa/Lurah (model N1).
- (2) Surat keterangan Asal-usul (model N2) dan foto copy Akta kelahiran.
- (3) Surat persetujuan calon mempelai (model N3).
- (4) Surat keterangan tentang orang tua (ayah dan ibu) dari kepala Desa/Lurah (model N4).
- (5) Photo copy piagam kursus calon pengantin/pranikah yang dilegalisir oleh KUA atau BP4.
- (6) Pas photo 2x3, 3x4 dan 4x6 (masing-masing 2 lembar) untuk buku nikah, buku administrasi dan akta nikah.
- (7) Surat izin/ izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun (model N5).
- (8) Surat kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempatmatinya suami/istri (model N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
- (9) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- (10) Surat izin dari atasan/kesatuan jika calon mempelai Anggota TNI/POLRI.
- (11) Putusan pengadilan berupa izin poligami bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- (12) Akta cerai talak/cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon mempelai janda atau duda.
- (13) Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.

(14) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

(15) Bagi Warga Negara Asing harus melampirkan surat-surat lain; surat izin dari kedutaan, surat status dari catatan sipil Negeranya.⁶

2) Tatacara pelaksanaan aqad nikah

a) Pemeriksaan administrasi nikah

(1) Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan nikah dan administrasi kepada kedua calon pengantin dan wali, kemudian menetapkan 2 orang saksi yang memenuhi syarat

(2) Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menanyakan kepada calon istri dihadapan dua orang saksi, apakah dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak. Jika calon istri bersedia dipersilahkan meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan calon suaminya, kemudian penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menanyakan kepada wali, apakah dia sendiri yang akan mewalikan anaknya atau mewakilkan.

b) Prosedur aqad nikah

(1) Pembacaan ayat suci Al qur'an

(2) Pembacaan khutbah nikah

(3) Ijab dan qabul

⁶Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, (Makassar: Cipta Mandiri, 2013), h. 1-3.


b. Pengetahuan agama (5 jam)

Pengetahuan Agama merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi keluarga dari berbagai hal yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan negatif yang dapat menjadi sumber terjadinya keretakan dalam rumah tangga, berikut ini beberapa hal yang perlu dipahami dan diamalkan oleh suami istri dalam kehidupan sehari-hari yaitu: Rukun Islam dan Rukun Iman.⁷

1) Thaharah (bersuci)

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih”, menurut syara’ berarti bersih dari hadast dan najis. Bersuci karena hadast hanya di bagian badan saja. Hadas ada dua, yaitu: hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayammum dan menghilangkan hadas kecil dengan wudlu atau tayammum.⁸ Firman Allah QS. Al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تَمْسُوا نِسَاءً فَلَمْ تَحْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka

⁷Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, h. 40.

⁸Moh.Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra,1978), h. 46.

mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁹

2) Shalat

Shalat menurut bahasa berarti berdo'a sedangkan menurut istilah sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁰ Adapun keutamaan mendirikan shalat telah dijelaskan dalam Al qur'an. Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹¹

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.¹²

c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)

⁹Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

¹⁰Muh.Tang, *Kursus Pranikah;Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, h. 51.

¹¹Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

¹²Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

Setiap perkawinan harus mendapatkan legitimasi atau legalitas hukum, baik yang berkenaan dengan hukum Agama (syariat Islam) maupun hukum Negara (Peraturan Perundang-undangan) diantaranya:

1) Pencatatan nikah dan biaya pencatatannya

a) Pencatatan nikah

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya syari'at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan perkawinan namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perekawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan itu terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹³

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat 1 dan 2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹³KUA pringsura, [http://kuapring surat.blogspot.co.id/2015/03/pentingnya-pencatatan nikah.html](http://kuapring surat.blogspot.co.id/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html), (24 november 2016).

¹⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Rhedbook Publisher, 2008), h. 461.

Pada pasal 26 ayat 1 sampai 4, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan:

- (1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN
- (3) Akta nikah disebut rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
- (4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
- (2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.¹⁵

b) Biaya pencatatan nikah

Biaya nikah atau rujuk diatur dalam Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Sebenarnya pencatatan nikah atau rujuk tidak dikenakan biaya baik pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun jika nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi yang dihitung sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Pasal 9

¹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, h. 10-11.

- (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara. Penerimaan pada Bank penerima setoran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan setempat.
- (5) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.¹⁶

Dan bagi masyarakat yang tidak mampu, dapat dibebaskan dari biaya pencatatan nikah disebutkan dalam pasal 24:

- (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat.
- (3) Bencana alam yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.
- (4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.¹⁷

c) Rukun dan syarat perkawinan

Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam kompilasi Hukum

Islam Bab IV pasal 14 adalah:

- (1) Calon suami
- (2) Calon isteri
- (3) Wali nikah
- (4) Dua orang saksi dan
- (5) Ijab dan Kabul¹⁸

¹⁶Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*, h. 7.

¹⁷Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*, h. 13.

Syarat perkawinan

(1)Syarat-syarat calon Suami:

- (a)Beragama Islam.
- (b)Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri.
- (c)Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- (d)Orangnya diketahui dan tertentu.
- (e)Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- (f) Calon suami rela(tidak dipaksa/terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.
- (g)Tidak sedang melakukan Ihram.
- (h)Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- (i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

(2)Syarat-syarat calon istri:

- (a)Beragama Islam atau ahli kitab.
- (b)Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- (c)Terang bahwa ia wanita. Bukan khunsa (banci)
- (d)Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
- (e)Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ikhtiyar.
- (f) Tidak sedang ihram haji atau umrah¹⁹

¹⁸Depertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997, h. 18.

¹⁹Al mansur Muhammad, <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, (23 november 2016).

2) Persetujuan calon pengantin dan Izin orang tua

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan ayat 6 :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰

3) Usia nikah

Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi

wanita. Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7:

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²¹

4) Poligami

²⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, h. 462.

²¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, h. 463.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 3

- a) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- a) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di suatu pihak lainnya mengandung aspek keperdaan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istrinya.²³

1) Hak suami terhadap istrinya

²²Republik Indonesia, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Cet IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 2.

²³H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51.

- a) Isteri harus taat pada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, dalam batasan-batasan yang dibenarkan syarak.
- b) Isteri mengurus dan menjaga rumah tangga termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

2) Hak isteri terhadap suaminya

- a) Mendapatkan mahar atau maskawin setelah dilangsungkan akad nikah.
- b) Mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c) Mendapatkan perlindungan dari suami.
- d) Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

3) Hak bersama antara suami dan isteri

- a) Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- b) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling membutuhkan.
- c) Berlaku hak waris mewarisi.

4) Kewajiban suami terhadap isterinya

- a) Memimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin
- b) Menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya..
- c) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dan berusaha memenuhi keperluan rumah tangga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain sebagainya.
- d) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak
- e) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai ajaran agama
- f) Tidak mempersulit atau membuat isteri menderita lahir dan batin.

g) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

5) Kewajiban isteri terhadap suaminya

- a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan asusila
- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga serta mewujudkan kesejahteraan keluarga
- c) Memelihara dan mendidik anak.
- d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- e) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya

6) Kewajiban bersama antara suami dan isteri

- a) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, hormat menghormati sopan santun, dan saling pengertian.
- c) Matang dalam berbuat dan bertindak/tidak emosional dalam menghadapi personal.
- d) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.²⁴
- e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)

Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pasangan suami isteri adalah menjaga kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi baik yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan alat reproduksi seksual maupun yang berkaitan dengan dengan alat reproduksi seksualnya baik pada saat produksi

²⁴Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga sakinah*, h. 96-100.

(masa hamil dan menyusui) maupun pada saat pasca produksi (menopause/ andropause).²⁵ Sebagaimana Firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمُ ...

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...²⁶

Firman Allah QS. An-Najm/53: 45-46.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۚ

Terjemahnya:

Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Dari air mani, apabila di campurkan.²⁷

f. Manajemen keluarga (3 jam)

Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur dan memimpin serta menggerakkan orang yang mencapai suatu tujuan tertentu.²⁸

Manajemen keluarga merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, memimpin dan menggerakkan anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah

²⁵ Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga sakinah*, h. 78.

²⁶ Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

²⁷ Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

²⁸ AnggaPramudhita, <https://angga16pramudhita.wordpress.com/2012/03/03/sistem-manaje-men-dalam-keluarga/>, (21 november 2016).

tangga bisa tercapai apabila kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik. Mulai dari kebutuhan lahiriah, bathiniah maupun sosial.²⁹

g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Psikologi perkawinan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku atau perbuatan dan gejala-gejala kejiwaan manusia dalam kaitannya dengan Perkawinan. Ditinjau dari segi psikologi, perkawinan merupakan suatu proses penyesuaian diri antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang hidup dalam suatu ikatan perkawinan.³⁰ Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi perkawinan, dan tujuan perkawinan.

1) Defensi perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal.³¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³² Definisi perkawinan lainnya adalah :

- a) Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.

²⁹Muh.Tang , *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga sakinah*, h. 90.

³⁰MuH. Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga sakinah*, h. 71.

³¹H.Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, 2003, h. 3.

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, h. 1-2.

- b) Perkawinan adalah antara dua mitra yang memiliki obligasi berdasarkan minat pribadi dan kegairahan.
- c) Perkawinan adalah komitmen emosional dan hukum dari dua orang untuk membagi kedekatan emosional dan fisik, berbagi bermacam tugas dan sumber-sumber ekonomi.³³

2) Tujuan perkawinan

- a) Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw umat Islam.
- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah
- c) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
- d) Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw
- e) Untuk membersihkan keturunan Keturunan yang bersih yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.³⁴

3) Hukum perkawinan

Hukum perkawinan itu mungkin menjadi wajib, atau sunnah, atau haram, atau makruh bagi seseorang sesuai dengan keadaan seseorang yang akan kawin.³⁵

³³KUA Kec.Bulukerto Kab.Wonogiri, <http://kuabulukerto.blogspot.co.id/2016/04/materi-psikologi-perkawinan.html>, (20 november 2016).

³⁴Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 12.

³⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 15.

a) Wajib

Orang yang diwajibkan kawin, ialah orang yang sanggup untuk kawin, sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

b) Sunnah

Orang yang disunnahkan kawin, ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang

c) Makruh

Orang yang makruh hukumnya kawin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin.

d) Haram

Orang yang diharamkan kawin ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau ia kawin di duga akan menimbulkan kemadharatan terhadap pihak yang lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

4. Tujuan Dan Manfaat Kursus Calon Pengantin

a. Tujuan kursus calon pengantin

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada calon pengantin untuk mengetahui tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetanggan dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul

karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca. Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Ujung dari kursus calon pengantin adalah terbinanya keluarga sakinah mawaddah warohmah sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga.³⁶

b. Manfaat kursus calon pengantin

Menurut Zulfikri manfaat kursus calon pengantin (suscatin) dirasakan langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.³⁷

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti “membuka ikatan“, “membatalkan perjanjian”. Furqha berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul“.kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.³⁸

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami isteri.

³⁶Eka Purnamasari, *”Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di Ruar Pamulang Tangerang Selatan*, skripsi (Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2016).

³⁷Agus Jaya. Agusjayabcd.blogspot.co.id/2015/08/efektivitas-kebijakan-kursus-calon.html/, (18 desember 2016).

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 156.

Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat menggantikan kata-kata tersebut atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal untuk suaminya.³⁹

Perceraian atau talak bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh dari diri anak tersebut telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

2. Dasar Hukum Perceraian

Menurut Bab VIII pasal 38 undang-undang no.1 tahun 1974, perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian atau atas keputusan Pengadilan .

Selanjutnya pasal 39 menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri⁴⁰.

Firman Allah dalam QS. At-Talaq/65:1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap* (Cet.II;Jakarta: Rajawali pers,2010), h. 230.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 38 dan 39.

يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ⁴¹ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maku tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁴¹

3. Sebab-sebab Perceraian

a. Minimnya ekonomi

Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Ingatlah bahwa syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami istri.

b. Komunikasi pasif

Komunikasi pasif antara suami dan istri juga sering menimbulkan masalah yang merujuk pada perceraian. Banyak perceraian terjadi di masyarakat karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jalan utama untuk mengatasi komunikasi pasif adalah mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dan bersifat terbuka

c. Perbedaan

⁴¹Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

Sering kali sebuah perbedaan menyebabkan seseorang melepas hubungan dengan orang lain tanpa toleransi terlebih dahulu. Seharusnya perbedaan menjadikan seseorang mengerti kekurangan antar satu dengan lainnya dan mewujudkan solusi untuk bersatu dan saling mengisi, bukan menjadikan perpisahan dan perpecahan.

d. Tidak konsekuensi

Menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Jika rasa konsekuensi ini hilang, maka sangat mudah terjadi perceraian.

e. Perselingkuhan

Selingkuh adalah sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan orang yang dicintai melakukan perselingkuhan kepada orang lain.

f. Masalah nafkah batin

Nafkah batin atau seks adalah salah satu alasan penting mengapa seseorang melangsungkan pernikahan. Selain kebutuhan dzhohir, kebutuhan batin pun harus terpenuhi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Terkadang ketidakpuasan dalam nafkah batin menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan, dan tentu titik fatal dari masalah ini adalah perceraian.

g. Kesibukan pekerjaan yang berlebihan

Sibuk bekerja membuat kedua pihak (suami dan istri) jarang melakukan komunikasi aktif. Aktifitas pekerjaan yang berlebihan membuat lelah, saat pulang bekerja keduanya mungkin akan menghabiskan waktu untuk istirahat. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak harmonis, apalagi ketika beban pekerjaan semakin

bertambah dan menumpuk. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran.

h. Kurangnya perhatian

Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pasangan mendapatkan perhatian kurang, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya.

i. Saling curiga

Mencurigai pasangan adalah sebuah penyakit yang harus diobati karena ini akan menimbulkan prasangka buruk, menuduh, dan fitnah dalam keluarga. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pasangan yang protektif.

j. Sering bertengkar

Pertengkaran dalam rumah tangga pasti dialami oleh banyak orang. Pertengkaran kecil sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika watak keduanya (suami dan istri) mudah tersinggung dan sulit untuk berdamai, tentu ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bernada perceraian.

k. Intimidasi dan tindak kekerasan

Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada bertahan..

l. Perselingkuhan

Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya Anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

m. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan Anda sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang Anda alami pada orang terdekat atau lembaga perlindungan.

n. Krisis moral dan akhlak

Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.⁴²

4. Dampak perceraian

- a. Hilangnya kesempatan bagi suami istri untuk berbuat ihsan dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.
- b. Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami dan terpecah belahnya anggota keluarga. Ibarat seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali.
- c. Berbagai perasaan cemas dan takut yang muncul menimpa suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi. Bahkan, tidak mustahil dia akan merasa

⁴²Fio, <http://fyoonyamart.blogspot.co.id/2012/10/perceraian-definisi-faktor-penyebab.html> (15 november 2016).

kesulitan mengumpulkan modal untuk menikah. Tidak jarang pula para orang tua merasa khawatir untuk menikahkan putri mereka dengannya setelah perceraianya dengan istri pertama. Hingga akhirnya dia tetap membujang selamanya.

- d. Kembalinya para wanita yang telah dicerai ke rumah orang tua atau wali mereka; bahkan ke rumah orang lain. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi mereka maupun para wali. Sebab, menetap di rumah orang tua maupun para wali setelah dicerai suami, tidak sama dengan ketika masih gadis sebelum menikah. Ini adalah satu hal yang sangat dipahami wanita.
- e. Sangat sedikit kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda setelah dicerai suaminya. Tidak mustahil, setelah bercerai, sang wanita tetap menjadi janda, tidak bersuami. Tentu hal ini mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
- f. Jika ternyata wanita yang dicerai memiliki anak, maka persoalan menjadi semakin runyam. Sebab, tidak jarang anak-anaknya yang tinggal bersama di rumah para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.
- g. Tidak jarang sang ayah mengambil anak dari ibunya dengan paksa, hingga ibu tidak pernah lagi dapat melihatnya; apalagi jika bapak dari anak-anak ini bertemperamen keras, pasti berpisah dengan anaknya akan sangat menyakitkan hatinya.
- h. Semakin menjauhnya ayah dari anak-anaknya. Bisa jadi disebabkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka ataupun disebabkan kesibukannya dengan istri baru yang biasanya tidak begitu memperhatikan anak-anaknya ketika tinggal bersama ibu tiri.

- i. Terlantarnya anak-anak disebabkan jauhnya dari ayah mereka dan kesulitan ibu untuk mendidik mereka sendirian. Hal ini akan menjerumuskan mereka bergaul dengan teman-teman yang buruk perangainya. Apalagi pada zaman yang penuh dengan fitnah dan tipu daya ini, tidak jarang anak-anak yang terlantar ini terjerumus ke lembah syahwat dan perzinaan, ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga akhirnya mereka menjadi sampah masyarakat. Tentulah hal ini sangat tidak diinginkan oleh setiap orang tua yang masih memiliki akal sehat dan kehormatan, sebab akan mencoreng arang di muka mereka.
- j. Banyaknya kasus perceraian di masyarakat akan menghalangi banyak pemuda dan pemudi untuk menikah, karena ketakutan mereka terhadap kegagalan dan prahara dalam berumah tangga, yang akhirnya melahirkan sikap traumatis. Tentu hal ini akan mendatangkan bahaya besar bagi masyarakat ketika mereka (para pemuda) terpaksa menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada hal-hal yang diharamkan syariat, semisal seks bebas, homoseks, lesbi dan penyimpangan seks lainnya.⁴³



⁴³Nazwar, <https://3gplus.wordpress.com/2008/04/21/ampak-perceraian-bagi-anak/>, (16 november 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis kinerja KUA terhadap Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan penelitian tersebut.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses penerapan kursus calon pengantin dalam menanggulangi perceraian.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena tingginya tingkat perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan dan yuridis (syar'i) yaitu pendekatan yang memperhatikan tata aturan perundang-undnagan yang berlaku khususnya pada perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

C. Sumber Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya¹. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Kantor Urusan Agama sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian.

¹Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Cet, IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014), h. 128.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian Pustaka (*liberary research*)

Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain pada sebuah daftar bahan pustaka.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.³

²Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

³Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, h. 130.

c. Dokumen

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁴

E. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Nurul Zuriah, instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi alat peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Ungkapan "*Garbage tool r garbage result*" merupakan hubungan antara instrumen dan data.⁵ Oleh karena itu, instrumen harus relevan dengan masalah yang akan diteliti agar diperoleh data yang akurat.

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat atau sarana pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen harus relevan dengan masalah dan aspek yang akan diteliti, agar supaya memperoleh data yang akurat.

Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:⁶

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

⁴Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 221.

⁵Nurul zuriah, *Metodologi penelitian social dan pendidikan*, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.168.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet,16; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 328.

2. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Handphone berfungsi untuk merekam semua percakapan dan pembicaraan dengan informan.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Data primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti *interview*. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni masyarakat Kecamatan Bontoa.

Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku atau Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ. II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin, Penyelenggara kursus

calon pengantin adalah badan penasehat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Depertemen Agama.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan analisis yuridis.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *repport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 335.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan Ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁸



⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 369-372 .

BAB IV

KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan bontoa

1. Sejarah Kecamatan Bontoa

Bontoa sebenarnya adalah nama yang *'masahoro'* (makassar: masyur, terkenal). Di tiap-tiap daerah Bugis Makassar di Sulawesi Selatan dapat dipastikan ada kampung yang dinamai *Bontoa* atau *Bonto*, sama halnya dengan nama *Tanete* atau *Tanetea*. *Bontoa* yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah *'Bontoar Marusu'*, berada di Maros, Kecamatan paling Utara *'Buttarsalewangan'* (nama lain Kabupaten Maros).

Penamaan Bontoa merujuk kepada kondisi tanah atau daerah rendah (dataran rendah). Dalam Bahasa Makassar sering disebut *"A'bontoi"* yang artinya rendah atau sering pula dimaknai *'sering tergenang air'*. Meski begitu tidak ada kesamaan kondisi semua daerah yang disebut *Bontoa* atau *Bonto* itu, karena *'kerendahan'* yang dimaksud juga memiliki level rendah dari segi topografinya yang berbeda-beda, ada yang rendah, dan ada rendah sekali. Itulah sebabnya biasa pula kita mendengar, *"liwa'rsekalirabbonto'na"* untuk menunjukkan suatu kawasan yang sangat rendah. Kondisi Bontoa atau Bonto itu menunjukkan suatu kawasan persawahan padi basah, rawa serta daerah dekat akses sungai dan laut.¹

¹Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa.Maros>, (10 April 201).

2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Bontoa

a. Letak Geografis

Kecamatan Bontoa merupakan Kecamatan yang berada di sebelah utara Kabupaten Maros yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Maros Baru, sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Lau. Luas wilayah Kecamatan Bontoa sebesar 93,52 km² atau hanya sekitar 6% dari Luas wilayah Kabupaten Maros, jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten \pm 11 Km.

Kecamatan Bontoa Terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) desa dengan 37 (tiga puluh tujuh) lingkungan/dusun yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di kecamatan Bontoa, antara lain :

Tabel I

Data Jumlah Desa/Kelurahan Dusun, dan RT Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

No	Desa/Kelurahan	Dusun	RT
1	Tunikamaseang	5	21
2	Bontoa	3	18
3	Pajukukang	3	22
4	Bonto Bahari	3	15
5	Tupabiring	4	21
6	Ampekale	4	12
7	Minasa Upa	5	22
8	Botolempangan	5	18
9	Salenrang	5	20

Jumlah	37	169
---------------	-----------	------------

Sumber : KCA Bontoa 2016

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Bontoa yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa dengan 37 Dusun dan 169 RT (Rukun Tetangga)

Tabel II

Luas dan Klasifikasi Geografis

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

No	Desa/ Kelurahan	Luas Desa/ Kelurahan (Km ²)	Pantai	Bukan Pantai		
				Lembah	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran
1	Tunikamaseang	6,24	-	-	-	5
2	Bontoa	2,91	-	-	-	3
3	Pajukukang	15,11	1	-	-	2
4	Bonto Bahari	15,71	1	-	-	2
5	Tupabiring	7,69	-	-	-	4
6	Ampekale	15,07	3	-	-	1
7	Minasa Upa	8,60	-	-	-	5
8	Botolempangan	12,59	-	-	4	1
9	Salenrang	9,60	-	2	2	1
Jumlah		93,52	5	2	6	24

Sumber : KCA Bontoa 2016

Berdasarkan data pada Tabel II maka dapat di ketahui bahwa secara geografis, Kecamatan Bontoa Terdiri dari 14% (5 dusun) kawasan pantai, 5% (2

dusun) kawasan lembah, 16% (6 dusun) kawasan lereng/punggung bukit, dan 65% (24 dusun) merupakan dataran.²

b. Letak Demografis

Penduduk adalah orang-orang atau sekelompok manusia yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, ada pun beberapa alasan manusia disebut makhluk sosial, karena, yaitu:

- 1) Karena manusia tunduk pada peraturan yang berlaku.
- 2) Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
- 3) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain
- 4) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia³.

Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2015 sekitar 0.95%⁴ sedangkan tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Bontoa yaitu 298 Jiwa/Km². Artinya dalam 1 Km² terdapat 298 jiwa yang tinggal di dalamnya, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Bontoa tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang, berdasarkan tabel berikut :

²Marwanto, *Statistik Daerah Kecamatan Bontoa*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2016.

³Rangga,aryadanuraja, *manusia sebagai makhluk individu dan sosial*, [https ://ranggaadr.wordpress .com/2015/01/02/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-sosial/](https://ranggaadr.wordpress.com/2015/01/02/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-sosial/), (20 April 2017).

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, [https ://maroskab.bps.g o.id/linkTab elStatis/view/id/33](https://maroskab.bps.go.id/linkTab elStatis/view/id/33), (21 April 2017).

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Kepadatan penduduk jiwa/km ²
1	Tunikamaseang	1.627	1.823	553
2	Bontoa	1.435	1470	998
3	Pajukukang	1.940	1926	256
4	Bonto Bahari	584	706	82
5	Tupabiring	1.037	1.055	272
6	Ampekale	1.446	1.469	193
7	Minasa Upa	1.413	1.423	330
8	Botolempangan	1.703	1.796	278
9	Salenrang	2.474	2.557	524
Jumlah		13.659	14.225	298

Sumber : KCA Bontoa 2016.

Jumlah penduduk Kecamatan Bontoa adalah sebanyak 27.884 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 13.659 dan penduduk perempuan 14.225 jiwa yang tersebar di 9 desa/kelurahan, dimana Desa Salenrang yang mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 5.031 jiwa dan Desa Bonto Bahari yang mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 1.290 jiwa.⁵

⁵Marwanto, *Statistik Daerah Kecamatan Bontoa*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2016.

Pendidikan merupakan faktor yang paling penting untuk memajukan kondisi suatu daerah, di Kecamatan Bontoa jumlah fasilitas pendidikan untuk tingkat SD sudah bisa dikatakan cukup karena dari setiap kelurahan/desa yang ada sudah memiliki bangunan fisik SD baik yang status negeri, inpres maupun swasta/madrasah ibtidaiyah.

Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Bontoa yaitu 10 buah yaitu, SDN 86 Mangarabombang, SDN 69 Sikapaya, SD 68 Kasijala, SDN 45 Pappaka, SDN 44 Padaria, SDN 43 Parasangan Beru, SDN 42 Cambaya, SDN 36 Tangaparang, SDN 28 Salenrang, SDN 20 Panjallingan. Jumlah Sekolah Dasar Inpres 15 buah yaitu SD Inpres 100 Balosi, SD 132 Inpres Lalang Tedong, SD 133 Inpres Talawe, SD 148 Inpres Bontoa, SD 166 Inpres Mangemba, SD 169 Parasangan Beru, SD 198 Inpres Suli-suli, SD 202 Inpres Pattalassang, SD 203 Inpres Binanga Sangkara, SD 204 Inpres Rea-rea, SD 219 Inpres Pannambungan, SD 221 Inpres Rammang-rammang, SD 229 Cambaya, SD 230 Inpres Pepebulaeng, SD 71 Inpres Lempangan, dan 2 Madrasah Ibtidaiyah yaitu MIS DDI Cambalagi.

Untuk tingkat SMP, sudah terdapat 4 SMP yaitu SMP Negeri 13 Bontoa dan SMPN 31 Satu Atap Lalang Tedong, SMPN 28 Satu Atap Salenrang, SMPS Islam An Nas 3 Sikapaya Bontoa, dan Bontoa dan 2 Madrasah Tsanawiyah yaitu MTSS AL-Wasi, dan MTSS DDI Cambalagi, Sedangkan untuk SMA yaitu 1 SMA Negeri yaitu SMAN 6 Bontoa Maros dan 2 Madrasah Aliyah yaitu MAS DDI Cambalagi, MAS Al-Wasi Bontoa.

Dari segi kepercayaan penduduk Kecamatan Bontoa, mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam yaitu: sekitar 26.101 jiwa, selebinya adalah non muslim. Dari data yang diperoleh bahwa nonmuslim yang berada di Kecamatan

Bontoa diantaranya: protestan 390 jiwa, Khatolik 47 jiwa, Hindu 5 jiwa, Budha 5 jiwa⁶.

3. KUA Kecamatan Bontoa

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

BAB I

Pasal 1

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.
- b. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
- c. KUA dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas

- a. Kepala KUA Kecamatan
- b. Petugas Tata Usaha, dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.⁷

1) Sejarah dan Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa

KUA Kecamatan Bontoa sebelumnya di sebut KUA Maros Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

⁶Website Resmi Kabupaten Maros, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Dan Jenis Kelamin Tahun 2010*, <https://maroskab.go.id/demografi>, 20 april 2017.

⁷Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, h.3-5.

KESATU: Menetapkan perubahan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa.



Data Pegawai KUA Kecamatan Bontoa
Tabel IV Data Pegawai Aparatur Sipil Negara KUA Kecamatan Bontoa

NO	NAMA/NIP	TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	JABATAN	PEN	ALAMAT
1	S. ABD. RAHIM ASSAQAF, S.HI 19720911 200212 1 003	11/09/1972	III/c	KEPALA KUA BONTOA	S1	Maros
2	H. MUHAMMADONG, S.Ag 19720918 200901 1 002	18 /09/1972	III/c	PENGHULU	S1	Tupabiring
3	SUBAEDAH, S.Ag 19711231 100901 2 009	31/09/1971	III/a	STAF	S1	Tupabiring
4	RAFIK, S.Ag. M. Pd. I 19731007 200710 1 021	07/10/1973	III/c	PENYULUH	S2	Maros
5	S. M. TANWIR, AS 19821017 201411 1 001	17/10/1982	II/a	STAF	SMA	Maros
6	ABD HARIS, S.Ag 19620622 201411 1 002	22/06/1962	III/a	PENYULUH	S1	Salenrang
7	KAHARUDDIN, S.Ag 19700123 201411 1 001	23/01/1970	III/a	PENYULUH	S1	Tunikamaseang

KUA Kecamatan Bontoa

Data Pegawai KUA Kecamatan Bontoa

Tabel V Data Pegawai Honorer KUA Kecamatan Bontoa

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TAHUN MASUK HONORER	ALAMAT
1	NURLINAH, S.Hi	15/09/1981	S1	2005	Panjallingan
2	ASKAR	19/06/1976	S1	2005	Makassar
3	A.NAJAMUDDIN, S.H	17/02/1966	S1	2005	Maros
4	S.HUSAIN.AS	28/06/1970	S1	2005	Maros
5	HJ. SURIANI	29/05/1978	S1	2005	Maros
6	YAHYA MASSI	03/01/1972	SLTA	2010	Barandasi

KUA.Kecamatan Bontoa

a) Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa

(1) Visi

Terwujudnya pelayanan yang prima dan profesional yang berlandaskan nilai-nilai agama

(2) Misi

- (a) Meningkatkan pelayanan prima dibidang nikah dan rujuk yang berbasis teknologi informatika.
- (b) Mewujudkan tatakelola Kantor Urusan Agama yang bersih dan amanah.
- (c) Membangun kerja sama antara sektoral dan lintas sektoral khususnya dibidang pelayanan sosial dan keagamaan.
- (d) Meningkatkan peran KUA, Penyuluh Agama Islam dan Organisasi keagamaan sebagai motivator dan fasilitator dalam hal pelayanan dan pembinaan keagamaan.

(3) Motto

Profesional dalam bekerja adalah ibadah.⁸

b) Menu Layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa

- (1) Pencatatan nikah
- (2) Kursus pra nikah
- (3) Sertifikat produk halal
- (4) Bina keluarga sakinah
- (5) Bimbingan manasik haji
- (6) Pendaftaran wakaf

⁸ Profil, KUA Kecamatan Bontoa, (20 april 2017).

- (7) Bimbingan kemasjidan
- (8) Pengukuran arah kiblat
- (9) Penyuluhan keagamaan⁹

B. Metode Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah.¹⁰ Sebelum melangsungkan perkawinan ada beberapa aspek yang harus diketahui seperti, bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan, bagaimana cara menjaga ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad, bagaimana menghadapi permasalahan rumah tangga yang mengancam ikatan suami istri dan sampai dengan bagaimana mengakhiri sebuah ikatan dan menjalin hubungan yang baik dengan bekas suami dan isteri, harta dan anak-anak oleh karena itu orang yang akan melangsungkan akad nikah hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan dari perkawinan.

Berdasarkan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin.

⁹ Profil, KUA Kecamatan Bontoa, (20 april 2017).

¹⁰S. Abd. Rahim Assaqqaaf, Kepala KUA Kecamatan Botoa, Wawancara, KUA Kecamatan Bontoa, (21 April 2017).

1. Tujuan kursus calon pengantin

- a. Peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan dan membina perkawinan dengan baik
- b. Peserta memiliki motivasi bagaimana membentuk keluarga yang bahagia
- c. Dapat memahami dan mengatasi tantangan dan problematika perkawinan
- d. Mengetahui dan memahami cara bergaul/berhubungan suami isteri yang baik
- e. Dapat menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam keluarga.

2. Visi kursus calon pengantin

Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah

3. Misi kursus calon pengantin

- a. Memberikan pengetahuan dan bimbingan tentang agama kepada calon pengantin
- b. Mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan ideal yang menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas sesuai dengan ajaran agama.

4. Dasar pelaksanaan kursus calon pengantin:

- a. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor. 477 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Negara Agama.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pemenerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Organisasi dan Tatakerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KUA Kecamatan Bontoa mulai melaksanakan kursus calon pengantin sejak tahun 2010, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/451 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, dan selanjutnya pada tahun 2013 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sebagaimana dalam peraturan tersebut peserta kursus pranikah:

Pasal 7

Peserta kursus Pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹

¹¹Departemen Agama RI, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, Pasal 7.

Sehingga pada tahun 2014 semua calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi nikah/pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bontoa.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa tetap mengacu pada kurikulum Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoma Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Bagi pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Bontoa wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan sebab kursus calon pengantin merupakan salah satu persyaratan pencatatan nikah, apabila salah satu dari calon pengantin (khususnya calon pengantin laki-laki) bertempat tinggal diluar Kecamatan Bontoa atau diluar daerah Kabupaten Maros wajib mengikuti kursus calon pengantin di KUA daerah tempat tinggalnya sebelum mengirim berkas-berkas persyaratan kelengkapan pencatatan nikah ke KUA Kecamatan Bontoa.

Penyelenggara kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa adalah Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang bekerjasama dengan BP4 yang dilaksanakan 2x (dua kali) dalam seminggu setiap hari senin dan kamis, mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 yaitu hanya 3 jam pelajaran dalam sehari dan setiap peserta kursus calon pengantin yang telah mengikuti 3 jam pelajaran diberikan sertifikat bukti kelulusan yang menjadi syarat pendaftaran/pencatatan perkawinan.

Dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin metode pemberian materi yang digunakan oleh narasumber dengan model penasehatan ceramah, pola tanya jawab dan studi kasus, sehingga calon pengantin lebih mudah memahami dan sudah ada gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam membangun rumah tangga dan sekaligus solusi penyelesaian masalah dalam rumah tangga dengan bijak.

Menurut Penyuluh KUA Kecamatan Bontoa Muhammad Rafik, M.Pd., beliau mengatakan metode penyampaian materi dengan model ceramah, penyampaian materi dengan cara berpasangan atau berkelompok sesuai dengan volume pendaftar yang telah ditentukan dan hadir pada hari itu, sebelum penyampaian materi, narasumber melakukan wawancara kepada para peserta kursus calon pengantin yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang para peserta kursus calon pengantin khususnya latar belakang pendidikan, sehingga narasumber bisa mengukur kemampuan-kemampuan pengetahuan dasar tentang sebuah pernikahan yang di ketahui oleh para peserta calon pengantin sehingga narasumber bisa memilih materi yang ingin disampaikan dan memilih metode model ceramah yang lebih mudah di pahami oleh para peserta.¹²

5. Materi kursus calon pengantin

Materi-materi kursus calon pengantin yang di sampaikan di KUA Kecamatan Bontoa mencakup inti-inti dari beberapa materi yang berhubungan dengan munakahat dan lebih mengarah ke pengetahuan agama seperti:

a. Tata cara dan prosedur perkawinan (Munakahat)

1) Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:¹³

¹²Muhammad Rafik, Penyuluh KUA Kecamatan Bontoa, Wawancara, KUA Kecamatan Bontoa, (21 April 2017).

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hal. 46.

- (1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan
- (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- (3) Adanya dua orang saksi
- (4) Siqhat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b) Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:¹⁴

- (1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri
- (2) Akad nikah dihadiri oleh para saksi
- 2) Prosesi Aqad Nikah

Sebelum akad nikah dilaksanakan dapat didahului dengan:¹⁵

- a) Pembacaan ayat suci Al-qur'an
- b) Pembacaan Khutbah nikah
- c) Ijab dan Kabul

(1) Istighfar

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet ke-3; Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2008), h. 49.

¹⁵ Muh. Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, h. 7-10.

Artinya:

Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Besar, Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang senantiasa hidup lagi mengurus segala sesuatu dengan sendiri-Nya, dan saya bertobat kepadanya.¹⁶

(2) Syahadatain

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya:

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.¹⁷

(3) Sighat ijab dan Kabul

(a) Ijab atau pernyataan menikahi dari wali mempelai wanita

(b) Kabul atau pernyataan menerima dari mempelai pria

(4) Pembacaan Do'a

b. Pengetahuan agama

Membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai tujuan utama perkawinan, bukanlah suatu pekerjaan yang gampang bagi pasangan suami isteri, syarat utamanya adalah rumah tangga tersebut dihuni oleh sepasang suami shaleh dan isteri shalehah. Pengetahuan agama merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi keluarga dari berbagai hal yang negatif yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan negati yang dapat menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga. Beberapa hal yang perlu dipahami dan diamalkan oleh suami-isteri dalam kehidupan sehari-hari:¹⁸

1) Rukun Islam

¹⁶ Moh.Rifa'i, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Cet.370. 2008), h.125.

¹⁷ Moh.Rifa'i, *Tuntunan Shalat Lengkap*, h.11.

¹⁸ Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, h. 40.

- a) Mengucapkan dua kalimat syahadat
- b) Mendirikan shalat lima waktu
- c) Puasa pada bulan ramadhan
- d) Mengeluarkan zakat (zakat harta dan zakat fitrah)
- e) Naik haji ke baitullah (makkah) bagi yang mampu secara fisik maupun materi.

2) Rukun Iman

- a) Beriman kepada Allah
- b) Beriman kepada Malaikat-Nya
- c) Beriman kepada Kitab-kitab-Nya
- d) Beriman kepada qada dan qadar-Nya.
- e) Beriman kepada Hari Akhir.

3) Taharah (bersuci)

Taharah termasuk amalan yang sangat penting dalam islam terutama dalam hal ibadah seperti keharusan mengerjakan shalat dalam keadaan suci dari hadats, baik hadats besar maupun hadas kecil. Ada pun hal-hal yang berkaitan dengan taharah (bersuci) diantaranya adalah: wudu, mandi wajib dan tayammum.¹⁹

c. Hak dan kewajiban suami isteri

Apabila akad telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami dan isteri dalam keluarga.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga dengan demikian, tujuan hidup

¹⁹ Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, h. 43.

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.²⁰

d. Tatacara bergaul (suami isteri) yang baik

Dalam Islam hubungan seksual suami isteri yang sah merupakan suatu ibadah sepanjang diniatkan karena Allah swt dan tidak sekedar untuk memenuhi hasrat seksual seseorang, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah melakukan hubungan seks.²¹ Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوُهُ وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²²

e. Manajemen keluarga

Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam adalah karena ia memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan ini. Berkaitan dengan kehidupan keluarga Al Qur'an menetapkan suami sebagai Kepala rumah tangga dan sebagian salah satu wujud tanggung jawab suami, ia mewujudkan aspek pembiayaan ekonomi dalam rumah tangga.²³

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 155.

²¹Hamzah Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Tangerang: CV Sejahtera Kita, 2011), h.111.

²²Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an*.

²³Hamzah Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah*, h. 94

Keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga bisa tercapai apabila kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari kebutuhan lahiriah, batiniah, maupun sosial.²⁴

f. Psikologi perkawinan

Untuk sekedar membantu memudahkan kita membayangkan model keluarga yang sakinah dalam Al Qur'an, paling tidak kita dikenal dengan adanya empat model keluarga, empat model keluarga itu sebenarnya lebih diarahkan untuk memberi contoh keluarga dalam kaitannya dengan da'wah. Namun tidak adasalahnya jika kita adopsi untuk memberikan gambaran tentang keluarga model siapa yang ingin kita contoh.²⁵

Pertama, keluarga Nabi Ibrahim a.s dan keluarga Nabi Muhammad saw yaitu keluarga yang semua komponen intinya mempunyai persamaan tujuan dan adanya kesiapan untuk bekerjasama saling bahu-membahu dalam tujuan bersama. Suami isteri, ayah-ibu dan anak-anak semua siap untuk mengabdikan kepada Allah, berjihad di jalan Allah dan selalu menjadikan ridho Allah sebagai targetnya. Yaitu sebuah keluarga yang indah yang selalu diharapkan setiap muslim dalam do'anya. Berdasarkan firman Allah QS. Al-Furqan/25:74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

²⁴Muh.Tang, *Kursus Pranikah; Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, h. 90.

²⁵ Didik Purwodarsono, *Memahami Makna Berkeluarga*, (Bantul: Pustaka Salma, 2002) h.8-10.

Terjemahnya:

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."²⁶

Kedua, keluarga Nabi Nuh a.s. dan Nabi Luth a.s. sebagai gambaran sebuah keluarga yang tidak harmonis. Suami dan bapaknya orang yang sangat saleh dan gigih dalam berdakwah, sementara isteri, ibunya dan anaknya sebagai contoh musuh dakwah, ahli maksiat dan calon penghuni neraka. Berdasarkan firman Allah QS. At-Thrim/66: 10.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".²⁷

Ketiga, keluarga Raja Fir'aun bagaimana model keluarga dimana ketaatan seorang isteri kepada Allah justru tidak dapat dukungan bahkan mendapat hambatan dari suami. Berdasarkan firman Allah QS. At-Tahrim/66:11.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

²⁶Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

²⁷Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

Terjemahnya:

Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim."²⁸

Keempat, keluarga Abu Lahab sebagai model keluarga yang hancur-hancuran, Firman Allah QS. Al-Lahab/111: 1-5.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا
حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ ١١١

Terjemahnya:

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. yang di lehernya ada tali dari sabut.²⁹

Menurut Kepala KUA Kecamatan Bontoa S. Abd. Rahim Assaqaaf, S.H.I., Beliau mengatakan sampai saat ini hanya materi inti yang bisa di berikan karena keterbatasan tenaga/pemateri dan menyangkut materi kesehatan reproduksi sampai saat ini belum dilaksanakan karena harus bekerjasama dengan instansi lain seperti BKKBN dan Puskesmas sedangkan tidak ada anggaran dana terkhusus untuk Kursus calon Pengantin.³⁰

Setelah menerima materi para peserta kursus calon pengantin diberi sertifikat bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setiap calon pengantin hanya menerima materi 3 jam pelajaran dari jam 09-12, tetapi tidak menuntut kemungkinan apabila calon pengantin merasa masih ingin menambah pengetahuan

²⁸Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

²⁹Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an.

³⁰S. Abd. Rahim Assaqaaf, Kepala KUA Kecamatan Botoa, Wawancara, KUA Kecamatan Bontoa, (21 April 2017).

sebelum berumah tangga, KUA Kecamatan Bontoa membolehkan untuk mengikuti kursus calon pengantin selanjutnya sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan di KUA Kecamatan Bontoa.

C. Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Mengurangi Kasus Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia tenggara termasuk Indonesia tergolong paling tinggi di dunia. Pada dekade itu dari 100 perkawinan 50 diantaranya berakhir dengan perceraian.³¹

Meningkatnya jumlah perkawinan muda selama sepuluh tahun terakhir berbanding lurus dengan tingkat angka perceraian pada Tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik.

Tabel V

Angka Perkawinan dan Perceraian di Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun	Perkawinan (pasang)	Perceraian (pasang)	Persentase (%) Angka perceraian dari Angka perkawinan
2009	2.162.268	216.286	10,00%
2010	2.207.364	285.184	12,91%
2011	2.319.821	258.119	11,12%
2012	2.291.263	372.577	16,26%

³¹Dedi panjaitan, http://www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia_55094acaa3331122692e3965. (29 april 2017).

2013	2.218.130	324.527	14,63%
------	-----------	---------	--------

Data Pikiran Rakyat³²

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian meningkat setiap tahunnya.

Tabel VI

Angka Perceraian di Kecamatan Bontoa dan Angka Perceraian Sekabupaten Maros Tahun 2010-2016

Tahun	Perceraian Kab.Maros (Pasang)	Perceraian Kec.Bontoa (Pasang)	Persentase (%)
2010	302	18	5,62%
2011	323	27	8,35%
2012	404	34	8,41%
2013	395	35	8,86%
2014	453	35	7,72%
2015	513	38	7,40%
2016	441	27	6,12%
Jumlah	2.831	241	8,51%

Dokumen Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka perceraian tahun 2010-2016 di Kabupaten Maros cukup bervariasi, sekitar 6%-9% diantaranya adalah angka perceraian di Kecamatan Bontoa (total angka perceraian tahun 2010-2016 di Kabupaten Maros adalah 2.831 pasang dan Kecamatan Bontoa 214 pasang

³²Pikiran rakyat, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-perceraian-di-indonesia-sangat-fantastis>, (28 april 2017).

atau (8,51%) dari angka perceraian di Kabupaten Maros) jumlah tersebut menggambarkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Bontoa cukup tinggi.

Tabel VII

Angka perkawinan dan perceraian di Kecamatan Bontoa

Tahun	Perkawinan (pasang)	Perceraian (pasang)	Persentase (%) angka perceraian dari angka perkawinan
2010	312	18	5,76%
2011	347	27	7,78%
2012	407	34	8,35%
2013	401	35	8,72%
2014	364	35	9,61%
2015	518	38	7,33%
2016	245	27	11,00%

Berdasarkan tabel di atas dilihat angka perkawinan di Kecamatan Bontoa tidak statis dan begitu juga dengan angka perceraian yang terjadi pada tahun 2010-2016 cukup tinggi.

Berikut ini rincian jumlah perceraian tahun 2016 di Kecamatan Bontoa:

Tabel VIII

Persentase Jumlah Perceraian Tahun 2016 di Kecamatan Bontoa

No	Identitas			Tahun Menikah	Usia perkawinan	Mengikuti Kursus calon pengantin	
	Nama (pasang)	Usia (tahun)	Pendidikan			Ya	Tidak
1	Rohani	37	SD	1996	±19 tahun		✓
	Saripuddin	38	SMA				
2	Muliati	23	SD	2009	±5 tahun		✓
	Muzakkie	33	SD				
3	St. Rabiah	48	SMP	2014	±2 tahun	✓	
	Abd Rasyid	56	SD				
4	Nur hayati	18	SD	2015	±1 tahun	✓	
	Muh Ardy	20	SD				
5	Rosdiana	30	SD	2006	±7 tahun		✓
	Riswanton	33	SMA				
6	H. Haeruddin	56	SD	2010	±4 tahun		✓
	Hj. Asse	51	SD				
7	Ramlah	24	SMP	2012	±1 bulan	✓	
	Ahmad	34	SD				
8	Suriani	29	SMP	2006	±10 tahun		✓
	Kamaruddin	33	SMP				
9	Irma Jaya	21	SD	2013	±2 tahun	✓	
	Muliadi	23	SMA				

10	Irawati	22	SMK	2012	±4 tahun	✓	
	Aswin	30	SMA				
11	Satriani	23	SD	2009	±6 tahun		✓
	Mansur	29	SD				
12	Risma	22	SD	2012	±3 tahun	✓	
	Firman	34	SMA				
13	Rezky	22	SD	2014	±8 bulan	✓	
	Rahman	26	SD				
14	Nur Hikmah	19	SMP	2014	±2 tahun	✓	
	Tamsir	22	SMP				
15	H. Borahim	61	Tidak ada	2008	±6 tahun		✓
	Muliati	41	SD				
16	Rahmawati	27	D3	2015	±1 minggu	✓	
	Amran	25	SD				
17	Nur Azizah	35	SD	1992	±19 tahun		✓
	Fatahuddin	42	SD				
18	Musliana	23	SMA	2013	±3 bulan	✓	
	Muh Rusli	24	SMA				
19	Wahida	43	Tidak ada	1991	±24 tahun		✓
	Jumali	46	SD				
20	Sumarni	36	SD	1995	±21 tahun		✓
	Saharuddin	38	SD				
21	Rismawati	24	SD	2009	±6 tahun		✓
	Rizal	32	SD				
22	Novianti	21	SMA	2012	±4 bulan	✓	
	Rizal	27	SMA				
23	Rostinah	38	SMA	1997	±18 tahun		✓
	Hasmullah	39	SMA				

24	Nahira	36	SMA	2011	±1 tahun	✓	
	Mursalim	28	SD				
25	Lina	19	SD	2014	±2 bulan	✓	
	Suardi	30	SD				
26	Kustina	28	SD	2011	±4 tahun	✓	
	Tamsir	28	SD				
27	Salwati	34	SD	2004	±7 tahun		✓
	Rusliadi	34	SMP				
Total						14	13
Persentase (%)						51.85%	48.14%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dari 27 pasang kasus perceraian di Kecamatan Bontoa tahun 2016 14 (51.85%) pasang di antaranya telah mengikuti kursus calon pengantin sedangkan 13 (48.14%) pasang di antaranya tidak mengikuti kursus calon pengantin (pernikahan dilangsungkan sebelum kursus calon pengantin diterapkan).

Adapun efektivitas kursus calon pengantin di Kecamatan Bontoa sudah tergambarkan dalam angka perceraian yang terjadi pada tahun 2010-2016 cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa kursus calon pengantin tidak efektif dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Bontoa.

Perceraian dapat terjadi disebabkan karena faktor usia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan perkawinan, ada pun faktor-faktor lain diantaranya :

1. Ekonomi
2. Perselingkuhan
3. Kekerasan dalam rumah tangga
4. Perbedaan prinsip
5. Campurtangan orang tua

Perkembangan teknologi saat ini juga merupakan salah satu dari pemicu utama terjadinya perceraian, gaya hidup yang dipengaruhi oleh teknologi misalnya:

- a. *Gadget* (hp android), *online shop*, dan semua barang atau makanan yang dapat di temukan secara instan, dapat mempengaruhi kebutuhan ekonomi. Faktor ekonomi meupaka penyebab terbanyak dari 70% yang mengajukan cerai adalah istri dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

b. Internet, sosial media melalui internet dapat memberikan pengaruh negatif yang dapat berpengaruh lebih cepat, contohnya melalui *facebook*, *bbm*, *line*, *instagram* dan sejenisnya, dari media sosial dapat menimbulkan kesalah pahaman bahkan perselingkuhan.

Kasus perceraian meningkat dan yang menjadi salah satu pemicunya dapat melalui sosial media, kasus perselingkuhan yang menyebabkan perceraian karena pertemanan dari sosial media, misalnya saja berteman dengan cinta lama bersemi kembali melalui sosial media dapat menimbulkan perselingkuhan.³³ Bukan hanya perselingkuhan tetapi dapat menimbulkan kecanduan bagi pengguna media sosial, mengumbar kemesraan dengan orang lain, banyaknya waktu luang yang di gunakan untuk media sosial yang mengakibatkan kurangnya waktu/perhatian dengan keluarga/orang sekitar, menyalah gunakan pendapat dan mengumbar permasalahan rumah tangga.

Faktor usia, kurangnya pengetahuan tentang tujuan perkawinan dan perkembangan teknologi sangat berpengaruh, sehingga angka perceraian di Kecamatan Bontoa cukup tinggi karena banyaknya hal yang dapat mempengaruhi sebuah hubungan perkawinan/rumah tangga, sehingga dengan kurang efektivnya pelaksanaan kursus calon pengantin, kursus calon pengantin tidak dapat meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Bontoa .

Menurut Kepala KUA Kecamatan Bontoa S. Abd. Rahim Assaqaaf, S.H.I., Beliau mengatakan ada pun upaya-upaya lain yang dilakukan KUA Kecamatan Bontoa dalam meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, membuka konsultasi perkawinan, membentuk keluarga sakinah dan memberikan nasehat perkawinan sebelum akad nikah.³⁴

³³Rahmawati alwi, <http://harianamanah.id/berita-percceraian-di-sulsel-capai-10000-kasus-benarkah-karena-dampak-media-sosial-ini-penjelasan-psikolog-unm.html>, (29 april 2017).

³⁴S. Abd. Rahim Assaqaaf, Kepala KUA Kecamatan Botoa, Wawancara, KUA Kecamatan Bontoa, (21 April 2017).

Yang bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat khususnya para calon pengantin dan para pemuda usia nikah atau mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan yang sebenarnya.

D. Analisis terhadap gambaran penerapan Peraturan Direktur Jenderal Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Peraturan direktur jendral bimas islam Depertemen Agama Nomor:DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin tidak di terapkan secara utuh di KUA Kecamatan Bontoa.

Pelaksanaan kursus calon pengantin melibatkan beberapa komponen diantaranya adalah narasumber, metode penyampaian materi, materi, waktu dan sarana prasarana. Semua komponen tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan/penerapan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa, untuk mengetahui apakah setiap komponen sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku, maka penulis menganalisa dari hasil penelitian dan wawancara dari beberapa informan:

1. Materi

Materi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa hanya mencakup materi-materi inti yang berhubungan dengan munakahat dan pengetahuan agama, diantaranya:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan Agama
- c. Hak dan kewajiban suami isteri
- d. Tata cara bergaul (suami isteri) yang baik
- e. Manejemen keluarga
- f. Fisikologi perkawinan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin menyebutkan bahwa materi yang harus disampaikan ada tujuh aspek yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga menurut penulis dalam penyampaian materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Bontoa masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin.

2. Narasumber

Narasumber di KUA Kecamatan Bontoa yaitu, Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang hanya mempunyai keahlian dibidang agama dan munakahat saja sedangkan untuk narasumber dibidang lainnya misalnya tim medis, psikologi masih belum bisa didatangkan hal ini tentu mengganggu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dengan maksimal.

Narasumber memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dengan mengadakan narasumber yang ahli dalam bidangnya sendiri sehingga para peserta kursus calon pengantin dapat menerima dan memahami materi dengan baik.

3. Waktu

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas perogram tersebut dengan waktu yang terbatas dan materi yang banyak dapat dipastikan bahwa penyampaian materi tidak optimal, waktu yang disediakan untuk pelaksanaan kursus calon pengantin hanya ± 3 jam dalam sehari, pada hari senin dan kamis dan setiap calon pengantin hanya mengikuti 3 jam pelajaran saja.

Berdasarkan hasil wawancara dari peserta kursus calon pengantin ibu Irmawati mengatakan bahwa waktu penyampaian materi sangat kurang, seharusnya waktu pemberian materinya ditambah supaya peserta kursus calon pengantin lebih bisa memahami dan harusnya ada sesi tanya jawab setelahnya karena waktu 3 jam itu saya sebagai peserta tidak sempat bertanya.³⁵

Hal ini tidak sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus calon Pengantin pada Pasal 3 ayat 4: Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

4. Metode

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 3 ayat 2: kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog simulasi dan studi kasus sedangkan metode pemberian materi yang diterapkan di KUA Kecamatan

³⁵ Irmawati, Peserta Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Bontoa, Wawancara, Maros, (18 Mei 2017).

Bontoa dengan metode model penasehatan ceramah (pola tanya jawab dan studi kasus), tetapi menurut penulisi pola tanya jawab hanya dilakukan sebelum materi berlangsung dan setelah materi tidak ada pola tanya jawab karena waktu yang digunakan hanya ± 3 jam pelajaran.

5. Silabus dan modul

Tidak adanya silabus dan modul yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Bontoa hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 5 ayat 1: Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sara dan prasarana kursus.

6. Sertifikat

Semua peserta kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai bukti kelulusan dan persyaratan pendaftaran perkawinan, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 5 ayat 2, semua calon pengantin yang telah ikut kursus calon pengantin memiliki sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a. Catin yang telah mengikuti kursus catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan
- b. sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan kursus calon pengantin di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa dengan model penasehatan ceramah, pola tanya jawab dan studi kasus, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa adalah Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang bekerjasama dengan BP4 yang di laksanakan 2x (dua kali) dalam seminggu setiap hari senin dan kamis, mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 (3 jam) pelajaran dan peserta yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberi sertifikat yang menjadi salah satu persyaratan pencatatan nikah.
2. Adapun efektivitas kursus calon pengantin di Kecamatan Bontoa sudah tergambarkan dalam angka perceraian yang terjadi pada tahun 2010-2016 cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa kursus calon pengantin tidak efektif dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Bontoa. Perceraian dapat terjadi disebabkan karena faktor usia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan perkawinan, ada pun faktor-faktor lain diantaranya: ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip dan campur tangan orang tua.

3. Analisis terhadap penerapan Peraturan Direktur Jenderal Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan tersebut tidak di terapkan secara utuh di KUA Kecamatan Bontoa.

B. Implikasi Penelitian

1. Untuk Kementerian Agama, Peraturan Derektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Untuk KUA, sebagai penyelenggara lebih intensif dalam pemberian materi dan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin dalam artian materi yang disampaikan dan waktu penyampaian materi seharusnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Depertemen Agama Nomor: DJ. II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoma Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan sebaiknya diselenggarakan juga kursus pranikah untuk para pemuda usia nikah.
3. Untuk peserta/calon pengantin, sebaiknya mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 10 hari jam kerja KUA sebelum waktu akad nikah dan lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber serta mengaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga dan mengembangkan sendiri materi-materi dasar yang diterima saat kursus calon pengantin demi mewujudkan tujuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Astuti Savitri, Isti. "Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara", (Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Agus,Jaya,Agusjaya.bcd.blogspot.co.id/2015/08/efektivitas-kebijakan-kursus-caon.html/.

Ahmad, Zainul. Kajian Ilmiah, <http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-pernikahan.html>.

Alwi, Rahmawati. <http://harianamanah.id/berita-perceraian-di-sulsel-capai-10000-kasus-benarkah-karena-dampak-media-sosial-ini-penjelasan-psikolog-unm.html>.

Arie.<http://gaswari.wordpress.com/2010/03/25/undang-undang-republik-indonesia-nomor-52-tahun-2009-tentang-perkembangan-kependudukan-dan-pembangunan-keluarga/>.

Aryadanuraja, Ranga. manusia sebagai makhluk individu dan sosial, <https://ranggaadr.wordpress.com/2015/01/02/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-makhluk-sosial/>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten.Maros,<https://maroskab.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/33>.

Chalida, Diah Maziatu. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin oleh KUA di Kec.Pagedongan Kab.Banjarnegara (studi kasus KUA Kec.Pagedongan Kab.Banjarnegara)", Skripsi, (Banjarnegara: Fak Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

Duray Achmad. "Pencatatan Perkawinan di Kantor urusan Agama", Skripsi, (Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2016).

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005)

Depertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997.

Fio.<http://fyoonyamart.blogspot.co.id/2012/10/perceraian-definisi-faktor-penyebab.html>.

Ashari, Wahyuni Fatimah. "Putusan Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin Poligami", Skripsi, (Makassar: Fak.Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2013).

Hasan Khaeriyah, Hamzah. *Membangun Keluarga Sakinah*, (Tangerang: CV Sejahtera Kita,2011).

Irmawati, Peserta Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Bontoa, Wawancara, Maros.

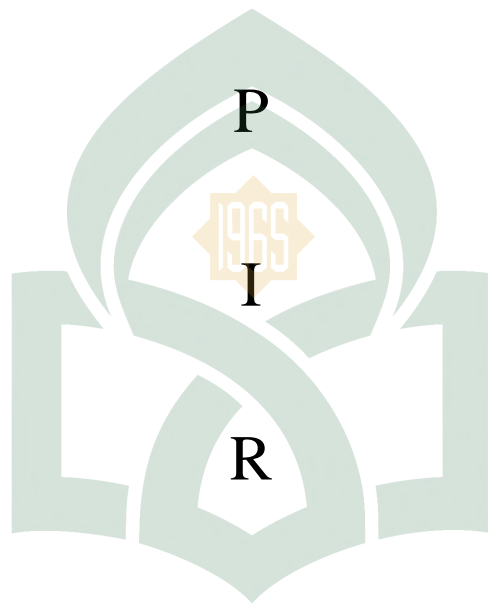
- Khotimah. “*Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan peranan BP4 Kec. Depok Kab.Sleman Daerah Istimewahr Yogyakarta*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak.Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2007).
- KUA,Pringsura,<http://kuapring surat.blogspot.co.id/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html>.
- KUA,Kec.Bulukerto,Kab.Wonogiri,<http://kuabulukerto.blogspot.co.id/2016/04/materi-psikologi-perkawinan.html>.
- Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011).
- Marwanto. Statistik Daerah Kecamatan Bontoa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2016.
- Muhammad Rafik, Penyuluh KUA Kecamatan Bontoa,Wawancara, KUA Kecamatan Bontoa.
- Muhammad,AlMansur.<http://muhammadalmansur.blogspot.co.id/2012/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>.
- Tang, Muh, *Kursus Pranikah: Petunjuk Praktis Menuju Rumah Tangga Sakinah*, (Makassar, Cipta Mandiri, 2013).
- Mukhtar,Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet ke 4; Jakarta: Bulan Bintang.1974).
- Nazwar,<https://3gplus.wordpress.com/2008/04/21/dampak-perceraian-bagi-anak/>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama No.DJ.II/491.2009, Tentang Kursus Calon Pengantin.
- Pramudhita,Angga.<https://angga16pramudhita.wordpress.com/2012/03/03/sistem-manajemen-dalam-keluarga/>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Purnamasari, Eka. “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*,” skripsi (Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah,2016).
- Panjaitan,Dedi.http://www.kompasiana.com/bangdepan/inilahpenyebabperceraian-tertinggi-di-indonesia_55094acaa3331122692e3965.
- Purnawan.Dwl.<http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/>.
- Pikiran rakyat,<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-perceraian-di-indonesia-sangat-fantastis>.

- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008).
- Riadi, Muchlisin. <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978).
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Rhedboook Publisher, 2008).
- Syamsul Alam, andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005).
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet, 16; Bandung: Alfabeta, 2013).
- Setiawan, Ebta. "*KamusVersiOnline*". Blog Ebta Setiawan. <http://kbbi.web.id/bina>.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Cet, IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014).
- Tihami dan Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.II; Jakarta: Rajawali pers, 2010).
- Taqi Mudarrisi, Muhammad. *Fikih Khusus Dewasa*, (Jakarta: Al-Huda, 1415 H).
- Undang-undang RI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Pokok Perkawinan, (Cet IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Maros.
- Website Resmi Kabupaten, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Dan Jenis Kelamin Tahun 2010, Maros <https://maroskab.go.id/demografi>.
- Zuriah Nurul. *Metodologi penelitian social dan pendidikan*, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

L

A

M



P

I

R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N



PENGADILAN AGAMA MAROS
Jalan Jend. Sudirman No. 9 Telp/Fax (0411) 371198-371137
Maros 90511

SURAT KETERANGAN

No. : W20.A5/ 95 /TL.00/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Zainal Farid, S.H.,M.HES.
N I P : 196906271993041005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1, IV/b
Jabatan : Wakil Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Maros

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum /Peradilan Agama
Judul Skripsi : "penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros"

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Maros, sesuai dengan surat pengantar izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No : S1.1/PP.00.9/1733/2017 Tanggal 25 April 2017
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Drs. Zainal Farid, S.H.,M.HES
NIP.196906271993041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTOA

Jl. Andi Raja No. 53 Panjallingan Bontoa

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-101/KUA.21.13.08/ PW.00/05/2017

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : S. Abd. Rahum Assaqqaf, S.HI.
NIP : 197209112002121003
Pangkat/Golongan : III/c
Jabatan : Kepala KUA
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan : Peradilan
Judul Skripsi : "Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam
Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa
Kabupaten Maros"

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, sesuai dengan surat pengantar izi penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No: s1.1/PP.00.9/1642/2017 Tanggal 06 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bontoa, 05 Mei 2017

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maros Utara.



S. Abd Rahim Assaqqaf, S.HI
NIP. 197209112002121003

PEDOMAN WAWANCARA

kepada Kepala KUA Kecamatan Bontoa

-
1. Bagaimana sistem penerapan kursus calon pengantin di Kecamatan Bontoa?
 2. Apa-apa dasar hukum tentang kursus calon pengantin?
 3. Sejak kapan kursus calon pengantin diterapkan di KUA Kecamatan Bontoa?
 4. Siapa yang berperan penting atau yang menjadi pelaksana dalam kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa?
 5. Apakah calon pengantin yang telah mendaftar pernikahan di KUA wajib mengikuti kursus calon pengantin ?
 6. Bagaimana jika calon pengantin yang telah mendaftar pernikahan tidak mengikuti kursus calon pengantin?
 7. Apakah dengan perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan selainnya, maka metode penyampaian materi kepada calon pengantin juga berbeda?
 8. Bagaimana metode yang di gunakan dalam kursus calon pengantin? Apakah secara berkelompok atau berpasangan?
 9. Materi-materi apa saja yang di berikan kepada Calon pengantin?, Berapa durasi pemberian masing-masing materi ?
 10. Adakah tanda bukti yang di berikan KUA Kecamatan Bontoa kepada calon pengantin yang telah mengikuti kursus?
 11. Apa arti penting dan tujuan dari kursus calon pengantin?
 12. Berapa jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Bontoa pada tahun 2014-2016?
 13. Apakah dengan masih adanya perceraian dapat dikatakan bahwa kursus calon pengantin sama sekali tidak berpengaruh kepada masyarakat khususnya?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Penyuluh dan Penghulu KUA Kecamatan Bontoa

1. Bagaimana sistem penerapan kursus calon pengantin di Kecamatan Bontoa?
2. Sejak kapan kursus calon pengantin diterapkan di KUA Kecamatan Bontoa?
3. Apakah calon pengantin yang telah mendaftar pernikahan di KUA wajib mengikuti kursus calon pengantin ?
4. Berapaa jarak waktu kursus calon pengantindari waktu akad nikah?
5. Materi-materi apa yang di berikan kepada peserta kursus calon pengantin?
6. Berapa lama penyampaian materi kursus calon pengantin?
7. Dari beberapa materi, materi apakah yang paling penting?
8. Berapa jumlah peserta kursus calon pengantin ?
9. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
10. Selain kursus calon pengantin upaya apa yang dilakukan dalam menekan angka perceraian?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Peserta Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Bontoa

1. Berapa usia bapak/Ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui arti atau tujuan perkawinan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa yang dimaksud kursus calon penganti?
5. Apakah menurut bapak/ibu kursus calon pengantin wajib diikuti untuk setiap calon pengantin?
6. Bagaimana metode pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bontoa menurut bapak/ibu?
7. Apa-apa saja materi yang diberikan saat mengikuti kursus calon pengantin?, Berapa lama waktu pemberian materi?
8. Apa yang menjadi bukti bahwa bapak/ibu telah mengikuti kursus calon pengantin?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang metode kursus calon pengantin yang di gunakan di KUA kecamatan Bontoa?
10. Adakah perubahan pengetahuan di diri bapak/ibu setelah mengikuti kursus calon pengantin?
11. Apa manfaat kursus calon pengantin menurut Bapak/ibu?
12. Apakah materi-materi kursus calon pengantin sangat penting diketahui sebagai bekal untuk membangun rumah tangga menurut bapak/ibu?
13. Apakah menurut bapak/ibu kursus calon pengantin di laksanakan oleh KUA Kecamatan Bontoa telah menanggulangi/mengurangi kasus perceraian?
14. Apakah menurut bapak/ibu dengan masih adanya perceraian dapat dikatakan bahwa kursus calon pengantin sama sekali tidak berpengaruh kepada masyarakat khususnya?

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mas'ud Taiyep
NIP : 196104211980031001
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Instansi : Pengadilan Agama Maros

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 26 April 2017



Mas'ud Taiyeb

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : S. ABD. RAHIM ASSAQQAF, S.H

NIP : 19720911 200212 1003

Profesi : KEPALA KUA KEC. BONTOA

Alamat : JL. BAMBU RUNCING No. 21 MAROS

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi

Nim : 10100113107

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 21 April 2017



S. ABD. RAHIM ASSAQQAF, S.H

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SIDRA
Tempat & tgl lahir : Maros, 02, 06, 1995
Profesi/pendidikan: SMA
Alamat : PAT TALLASSANG

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 27 April 2017


.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FIAZAL
Tempat & tgl lahir : Manokwari / 1-2-1992
Profesi : Swasta
Alamat : Pangkep

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 27 April 2017


.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kasmawati
Tempat & tgl lahir : Maros, 01 Juni 1992
Profesi : -
Alamat : Pattallassang


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 27 April 2017


Kasmawati

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jufriz
Tempat & tgl lahir : Maros, 25 Juli 1992
Profesi/Pendidikan : Swasta/ S1
Alamat : Parasangan Baru

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 27 April 2017


.....Jufriz.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAFIK

NIP : 19731007 200910 1021

Profesi : PENGULUH AGAMA ISLAM

Alamat : BTN. NUSA IDAMAN

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi

Nim : 10100113107

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syariah dan Hukum


Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Maros, 21 April 2017


M. RAFIK, S.Ag. M.Pd

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. ABD HARIK ABDULLAH S Ag
NIP : 196206222014111002
Profesi : PENYULUH AGAMA ISLAM
Alamat : DUSUN SALEMPANG

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Maros, 27 April 2017


H. ABD HARIK S, Ag

REKOMENDASI INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Muhammadong, S. Ag
NIP : 19720918 2009 01 1002
Profesi : Penghulu
Alamat : Tupabiring

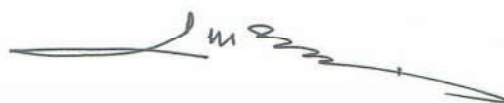
Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kursus Calon Pengantin” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “Penerapan Kursus Calon Pengantin dalam Menaggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, oleh:

Nama : Nur Alimahmudrikah Rusydi
Nim : 10100113107
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digubakan sebagaimana mestinya.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Maros, 02 Mei 2016


H. Muhammadong, S. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTOA
Jl. Andi Raja No. 53 Panjallingan Bontoa
Kabupaten Maros

SERTIFIKAT

Nomor : ST.103/43/KUA.21.13.08/PW.00/04/2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Calon : **SIDRA**
Bin/Binti : **SARAKA**
Tanggal Lahir : **Maros, 02 Juni 1995**
Nik :
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pendidikan : **SMA**
Pekerjaan : **-**
Alamat : **Dusun Pattallassang**

Telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan **Lulus** dengan perdikat **Baik**.



Bontoa, 27 April 2017

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maros Utara.

S. Abd. Rahim Assaqqaf, S.HI



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTOA
Jl. Andi Raja No. 53 Panjallingan Bontoa
Kabupaten Maros

SERTIFIKAT

Nomor : ST.102/42/KUA.21.13.08/PW.00/04/2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Menerangkan
dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Calon : **FAIZAL**
Bin/Binti : **H. ANSAR**
Tanggal Lahir : **Manokoari, 01 Februari 1992**
Nik : **9202120102920001**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Pendidikan : **SMA**
Pekerjaan :
Alamat : **Komp. Makassar. RT/ RW, 001/009**

Telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Yang
diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan **Lulus** dengan
perdikat **Baik**.



Bontoa, 27 April 2017

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maros Utara.

S. Abd. Rahim Assaqqaf, S.HI



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTOA
Jl. Andi Raja No. 53 Panjallingan Bontoa
Kabupaten Maros

SERTIFIKAT

Nomor : ST.107/47/KUA.21.13.08/PW.00/04/2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Calon : **KASMAWATI**
Bin/Binti : **BAKRI**
Tanggal Lahir : **Maros, 01 Agustus 1992**
Nik : **7309054108920001**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pendidikan : **SI**
Pekerjaan : **-**

Alamat : **Dusun Pattalassang Desa Tunikamaseang**

Telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan **Lulus** dengan perdikat **Baik**.



Bontoa, 27 April 2017

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maros Utara.


S. Abd. Rahim Assaqqaf, S.HI



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTOA
Jl. Andi Raja No. 53 Panjallingan Bontoa
Kabupaten Maros

SERTIFIKAT

Nomor : ST.106/46/KUA.21.13.08/PW.00/04/2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Calon : **JUFRI**
Bin/Binti : **ROMBA**
Tanggal Lahir : **Maros, 25 Juli 1992**
Nik : **7309052507920003**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Pendidikan : **S1**
Pekerjaan : **-**
Alamat : **Dusun Parasangan Beru Desa Pajukukang**

Telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan **Lulus** dengan perdikat **Baik**.



Bontoa, 27 April 2017

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maros Utara.

S. Abd. Rahim Assaqqaf, S.HI



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710

Website : www.bimasislam.depag.go.id e-mail : info@bimasislam.net

Telepon : (+6221) 3811642 - 3811654 - 3611658 Hunting : 3441750 Fax : 3865291

PC.BOX. 3733 JKP 10037.

Jakarta, 11 Desember 2009

Nomor : DJ.II/PW.01/1997/2009
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : **Segera**
Perihal : Peraturan Dirjen tentang Kursus Calon Pengantin

Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Departemen Agama
Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam;
2. Ketua BP4 Provinsi.

Se- Indonesia

Menindak lanjuti Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, perlu kami sampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah-warahmah, maka perlu dilakukan Kursus kepada Calon Pengantin.
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Tentang Kursus Calon Pengantin tertanggal 10 Desember 2009, dimohon kepada seluruh Kepala Kanwil Departemen Agama dan Ketua BP4 Provinsi Se- Indonesia untuk meneruskan dan mempedomaninya. (Peraturan Dirjen terlampir)

Demikian untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
NIP. 195906231985031002

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR DJ. II/491 TAHUN 2009

TENTANG
KURSUS CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
- (5) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial-keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III ...

BAB III
MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 3

- (1) Materi Kursus Catin meliputi:
 - a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - b. Pengetahuan agama (5 jam)
 - c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
 - f. Manajemen keluarga (3 jam)
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.....

BAB IV
PENYELENGGARAAN KURSUS

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua
Sarana Penyelenggaraan Kursus

Pasal 5

- (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/ registrasi;

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 6

- (1) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan; ✓
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

Kami ucapkan selamat atas tersusunnya buku ini dan dapat diterbitkan tepat pada

- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juni 2013
Jakarta, 25 Maret 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban menandatangani nomor akreditasi badan penyelenggara yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kami ucapkan selamat atas tersusunnya buku ini dan dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Ditetapkan di Jakarta, pada
tanggal 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A.	KELOMPOK DASAR						
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI	<ul style="list-style-type: none">- Konsep perkawinan- Azas perkawinan- Pembatasan poligami- Batasan usia nikah- Pembatalan perkawinan- Perjanjian perkawinan- Harta bersama- Hak dan kewajiban- Masalah status anak- Perkawinan campuran	1	
				2. UU KDRT	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian KDRT- Bentuk-bentuk KDRT- Faktor-faktor Penyebab KDRT- Dampak KDRT- Aturan Hukum- Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga	1	
				3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian anak- Hak anak- Kedudukan anak dalam Islam	1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan		1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi.	1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakulkarimah Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan	2	

					yang suci		
				3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
				4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas		
				6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan		

				7. Fungsi Sosial Budaya.	<ul style="list-style-type: none"> b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga <ul style="list-style-type: none"> 7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama 		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf : 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif 2.a. Saling memahami b. Saling menghargai 3.a. Deskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga 	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			<p>1. Faktor penyebab konflik</p> <p>2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya</p> <p>3. Solusi atau cara mengatasi konflik</p>	<p>1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan</p> <p>b. komunikasi tidak efektif</p> <p>c. hambatan penyesuaian diri</p> <p>2.a. Cekcok terus menerus</p> <p>b. Cara komunikasi yang merusak hubungan</p> <p>3.a. Pasangan</p> <p>b. Keluarga besar masing-masing pihak</p> <p>c. Institusi konseling</p>	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			<p>1. Pengertian/Deskripsi</p> <p>2. Upaya mencapai keluarga sakinah</p> <p>3. Membina hubungan dalam keluarga</p>	<p>1.a. Pengertian psikologi perkawinan</p> <p>b. Pengertian keluarga</p> <p>c. Ruang lingkup psikologi keluarga</p> <p>2.a. membentuk akhlak luhur</p> <p>b. menegakan rumahtangga Islami</p> <p>c. meningkatkan ibadah</p> <p>3.a. Harmonisasi suami-isteri</p> <p>b. Orangtua dan anak</p> <p>c. Anak dengan anak</p> <p>d. anak dan anggota keluarga lain</p> <p>e. kebersamaan dalam keluarga</p>	2	

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Kami ucapkan selamat atas tersusunnya buku ini dan dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Semogga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Jakarta, Maret 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

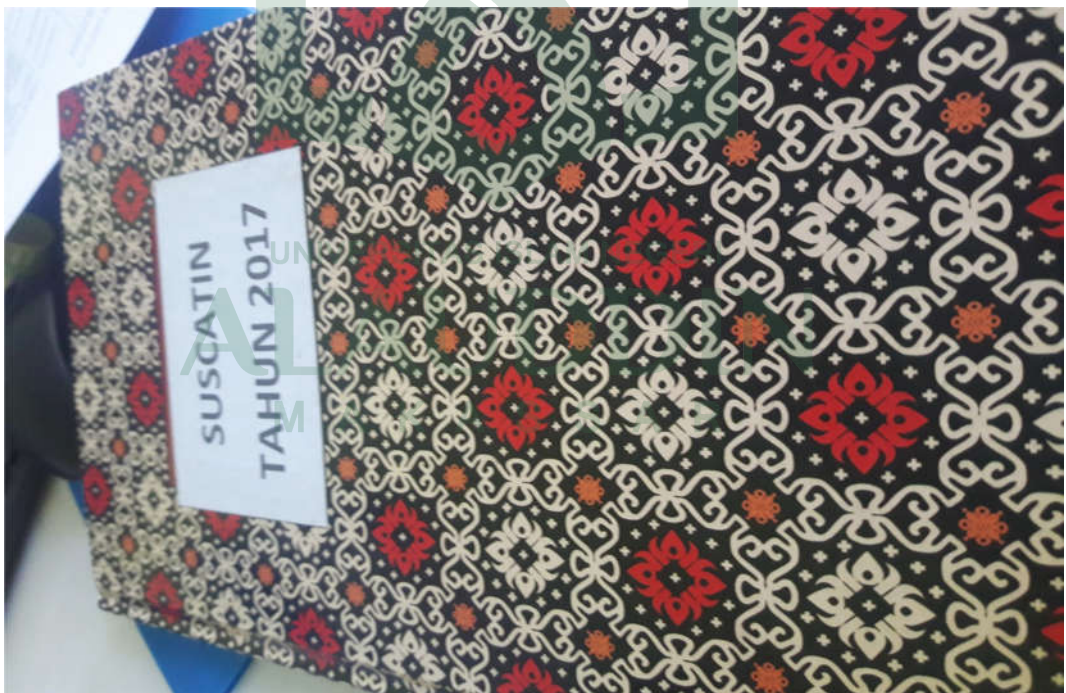
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa



Kursus Calon Pengantin









Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR ALIMAHMUDRIKAH RUSYDI, lahir di Maros pada 08 Maret 1995 Putri kedua dari empat bersaudara ini adalah anak dari pasangan Drs. Muh. Rusydi, M.M (alm) dan ST. Munirah, S.HI. Penulis memulai pendidikan di Raudatul Atfal Mir'ati Sohih selama satu tahun pada tahun 2001. Selanjutnya di bangku Sekolah Dasar No. 16 Inpres talawe sekarang telah diubah menjadi Sekolah Dasar 133 Inpres dan tamat Pada tahun 2007. Pendidikan selanjutnya di MTs Nahdlatul Ulum Soreang dan tamat tahun 2010. Penulis menempuh pendidikan menengah atas di MA DDI Cambalagi dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis mendapat kesempatan melanjutkan studinya pada tahun 2013 di UIN Alauddin Makassar Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum sampai sekarang.